

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
(SAP) DALAM LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PRABUMULIH**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Negara**



Diajukan Oleh :

RIZKI PUSPITA SARI

07011281320037

ADMINISTRASI KEUANGAN PUBLIK

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) DALAM
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PRABUMULIH**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menempuh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**

Oleh :

**RIZKI PUSPITA SARI
07011281320037**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Juli 2018

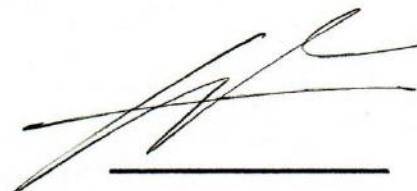
Pembimbing I

**Dr. Nengyanti, M.Hum
NIP.196704121992032002**



Pembimbing II

**Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001**



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Menyusun Laporan Keuangan Tahunan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tanggal 18 Juli 2018.

Palembang, 18 Juli 2018

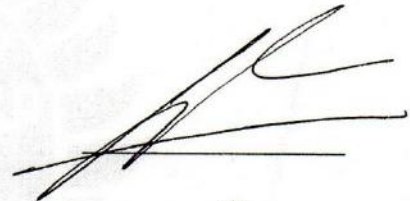
Ketua :

1. Dr. Nengyanti, M.Hum
NIP.196704121992032002

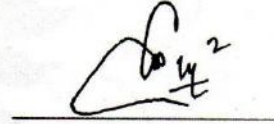


Anggota:

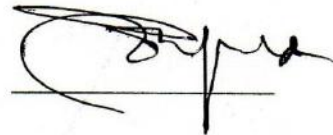
2. Dra. Martina, M.Si
NIP.196603051993022001



3. Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP.196712011992032002



4. Dr. Raniasa Putra, M.Si
NIP.196603051993022001



Mengetahui

Dekan FISIP



Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si
NIP.196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP.198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Entah akan menjadi ibu rumah tangga atau wanita karir, perempuan harus berpendidikan tinggi karena ia akan menjadi seorang ibu.”

(Dian Paramita Sastrowardoyo)

Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk:

- ❖ Allah SWT.
- ❖ Kedua Orang Tua ku
- ❖ Saudara kandungku
- ❖ Teman-temanku FISIP 2013
- ❖ Dosen dan Pegawai Fisip Unsri
- ❖ Almamaterku

ABSTRACT

This research is conducted by research in the form of financial statements, from cash to accruals become the basis of accruals. This condition is caused by human resources. This causes problems in creating financial statements. The purpose of research to find out how the application of accounting standards. The theory used, the financial statements in Erlina, consists of several dimensions, that is, understandable, relevant, reliable and can be compared with some indicators. The research method is descriptive qualitative. Data collection techniques with interviews to key informants, and literature study. The results of research, in accordance with qualitative characteristics have been applied according to aspects that are, understandable, relevant, reliable, and comparable. In terms of the extent of relating to aspects related to resources. Any changes that occur are expected from the government of Prabumulih City can be given training on financial reporting staff who managed by the Office of Revenue Management Finance and Regional Assets Prabumulih City.

Keywords: Implementation, Finance, Accounting, SAP, DPPKAD

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perubahan kebijakan dalam menyusun laporan keuangan, dari *cash to* akrual menjadi basis akrual. Kondisi ini menimbulkan permasalahan dikarenakan sumber daya manusia kurang memahami akuntansi pemerintahan. Hal ini menyebabkan terjadinya kendala dalam menyusun laporan keuangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan. Teori yang digunakan yaitu, karakteristik kualitatif laporan keuangan dalam Erlina, terdiri dari beberapa dimensi yaitu, dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan dengan beberapa indikator. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada *key informan*, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian, berdasarkan karakteristik kualitatif sudah diterapkan sesuai aspek yaitu, dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Dari keempat aspek tersebut kendala yang dihadapi terdapat pada aspek dipahami dikarenakan kurangnya pemahaman sumberdaya manusia mengenai standar akuntansi pemerintahan. Adanya kendala yang terjadi diharapkan dari pemerintahan Kota Prabumulih dapat mengadakan pelatihan pada pegawai penyusun laporan keuangan terutama pegawai yang akan dimutasikan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih.

Kata kunci: Penerapan, Keuangan, Akuntansi, SAP, DPPKAD

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Laporan Keuangan Tahunan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih”**, maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana S-1 prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa tidak sedikit kendala yang dialami dalam menyusun skripsi ini, namun berkat pertolongan dari-Nya dan dukungan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan,, M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik periode 2014-2018.
5. Bapak Sofyan Effendi,S.IP, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Bapak Dr. Andries Leonardo, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik periode 2014-2018.
8. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
9. Bapak Dr. Raniasa Putra, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik periode 2014-2018 sekaligus selaku Pembimbing Akademik dan sebagai Dosen Penguji II.
10. Ibu Ermanovida, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

11. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik periode 2014-2018 sekaligus selaku Dosen Pembimbing II.
12. Ibu Dr. Nengyanti, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan masukan selama penulisan skripsi.
13. Ibu Dr. Nurmah Semil, M.Si selaku Dosen Penguji I.
14. Seluruh Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
15. Ibu Yunita Soraya Husin, S.E, M.M, A.k yang telah membantu dalam penulisan skripsi.
16. Segenap Karyawan dan Staff FISIP Universitas Sriwijaya,
17. Bapak dan Ibu pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih.
18. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
19. Teman-temanku Nesia, Ayu, Sarah, Defa, Sherly, Zahara, Ucup, Debi, Ecak, Merinda, Diany, Windy, Seli, Widya, Putri, Intan, Eliza, Siti, Deviana, dan Monalisa atas semangat dan dukungannya dalam masa penulisan skripsi.
20. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan usulan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan, pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dan bagi para pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Palembang, 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep/Teori.....	8
1. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	8
2. Ruang Lingkup Standar Akuntansi Pemerintah.....	11
3. Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintah.....	13
4. Karakteristik Kualitatif Pelaporan Sektor Publik	15

B. Penelitian Terdahulu	19
C. Kerangka Pemikiran	21
D. Proposisi	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	26
B. Definisi Konsep	27
C. Fokus Penelitian	28
D. Jenis Data dan Sumber Data	30
E. Informan Kunci	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Analisis Data	34
H. Validitas dan Reliabilitas Data	36

BAB VI HASIL DAN PEMBAHASA

A. Gambaran Umum Kota Prabumulih	38
1. Kota Prabumulih	38
2. Aspek Geografis	39
3. Bentuk dan Arti Lambang	41
4. Visi dan Misi Kota Prabumulih	42
B. Gambaran Umum DPPKAD Kota Prabumulih	43
1. Tuga Pokok dan Fungsi	46
2. Struktur Organisasi	52
3. Visi dan Misi DPPKAD Kota Prabumulih	53
C. Hasil Pembahasan	55
1. Dapat Dipahami	55

2. Relevan.....	60
3. Andal	67
4. Dapat Dibandingkan.....	73
D. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan SAP	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Table 1 Strategi Penerapan SAP Berbasis AkruaI	5
Table 2 <i>Review</i> Penelitian Terdahulu.....	20
Table 3 Fokus Penelitian	29
Table 4 Kelurahan dan Kecamatan Kota Prabumulih.....	40
Table 5 Jadwal Petanggungjawaban Pelaksanaan APBD	64
Table 6 Perbandingan LRA-Pendapatan (Realisasi)	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	24
Gambar 2 Peta Kota Prabumulih.....	39
Gambar 3 Lambang Kota Prabumulih.....	41
Gambar 4 Kantor DPPKAD Kota Prabumulih	43
Gambar 5 Bidang Akuntansi.....	50
Gambar 6 Sistematisasi Pembuatan Laporan Keuangan	56
Gambar 7 Laporan Realisasi Anggaran.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Surat Tugas Dosen Pembimbing Proposal Usulan Skripsi	83
Kartu Bimbingan Skripsi.....	84
Surat Izin Penelitian	90
Pedoman Wawancara	91
Transkrip Wawancara	95
Pedoman Observasi	105
Pedoman Dokumentasi	106
Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010	107

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakekat otonomi adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang meliputi dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah, serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya sistem desentralisasi secara transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Cara untuk mewujudkan pertanggungjawaban tersebut memerlukan media tertentu. Salah satu media untuk memfasilitasi proses pertanggungjawaban pemerintah daerah yaitu dengan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang kompetitif. Laporan keuangan pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar penyusun anggaran pada periode berikutnya, penilaian prestasi kerja pemerintah serta sebagai alat pemotivasi, oleh karena itu dibuat sebuah sistem akuntansi yang merupakan standarisasi laporan keuangan yang

Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertugas menyusun konsep standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan KMK 308/KMK.012/2002. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan pertanggung jawaban APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Terbitnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) selain untuk mewujudkan *good governance* juga merupakan jawaban atas penantian adanya pedoman pelaporan keuangan yang dapat diterima umum..

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Kas Menuju AkruaI menjadi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI (PP No. 71 Tahun 2010 pasal 7 ayat 1). Berdasarkan hal tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadikan laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan).

Secara konseptual akuntansi berbasis akruaI dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis kas pencatatannya dilakukan tidak pada saat transaksi tetapi saat bukti transaksi diterima, hanya fokus pada arus kas yang sedang berjalan. Akuntansi berbasis akruaI mampu mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan tetapi memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun

yang belum dibayar. Akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang.

Akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan dapat mengukur efektivitas kinerja keuangan pemerintah. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah melalui kementerian keuangan membuat standar dalam penyajian laporan keuangan untuk mewujudkan akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Kota Prabumulih saat ini, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam pembuatan pelaporan keuangan. Tahapan penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih dimulai pada tahun 2010, standar akuntansi pemerintahan yang diterapkan di Kota Prabumulih sendiri masih pada tahap kas menuju akrual. Pada tahun 2010 diterbitkan kembali PP SAP nomor 71 Tahun 2010 salah satu kerangka konseptual yang berubah adalah adanya penerapan berbasis akrual secara penuh walaupun hal tersebut akan diterapkan secara bertahap. Tahapan penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih pada tahun 2015 sudah harus pada tahap basis akrual. Berdasarkan hasil pendapat yang diutarakan oleh Kasubid Akuntansi Pelaporan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Prabumulih:

“Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) tahun 2015 sudah pada tahap SAP berbasis akrual. Sesuai dengan keputusan yang diberikan pemerintah pusat, penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara penuh dilaksanakan pada tahun 2015.”

Pernyataan kasubid akuntansi pelaporan menyatakan penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih sudah dalam tahap basis akrual. Ini sejalan dengan isi dalam standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat segera di terapkan mulai tahun 2010 dan apabila entitas pemerintah belum siap menerapkan masih diperkenankan untuk menerapkan standar akuntansi pemerintah kas menuju akrual (PP No 24 tahun 2005) sampai dengan tahun anggaran 2014, pemerintah diberikan waktu untuk mempersiapkan penerapan basis akrual sampai tahun anggaran 2014 sehingga pada tahun 2015 semua instansi pemerintahan sudah diharuskan menggunakan basis akrual. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dapat diterapkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan, maka diperlukan sebuah strategi dan rencana kerja untuk memandu pelaksanaan penerapana standar akuntansi pemerintahan.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyusun rencana strategi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Tujuan dibuatnya strategi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berisi mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk mengimplementasi penuh Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Strategi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dimulai dari anggaran tahun 2010 sampai dengan tahun anggaran 2015. Strategi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual diharapkan dapat membantu untuk mencapai kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan andal mengingat dokumen yang dihasilkan sangat penting yaitu laporan keuangan. Strategi penerapan standar akuntansi berbasis akrual, dapat dilihat dari tabel 1.

Tabel 1 Strategi Penerapan SAP Berbasis Akruaal

Tahun	Agenda
2010	<ul style="list-style-type: none">• Penerbitan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual• Mengembangkan kerangka kerja akuntansi berbasis akrual• Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual
2011	<ul style="list-style-type: none">• Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi• Pengembangan sistem akuntansi dan TI bagian pertama (<i>proses bisnis dan detail requirement</i>)• Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
2012	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan sistem akuntansi dan TI (lanjutan)• Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) lanjutan
2013	<ul style="list-style-type: none">• <i>Piloting</i> beberapa KL dan BUD• <i>Review</i>, evaluasi dan penyempurnaan sistem• Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) lanjutan
2014	<ul style="list-style-type: none">• <i>Parallel Run</i> dan konsolidasi seluruh laporan keuangan• <i>Review</i>, evaluasi dan penyempurnaan sistem• Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) lanjutan
2015	<ul style="list-style-type: none">• Implementasi penuh• Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) lanjutan

Sumber : Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP: 2010) dalam Halim (2013:75)

Strategi penerapan standar akuntansi pemerintahan ini dimulai pada tahun 2010 yaitu awal mula langkah yang dilakukan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah penerbitan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pengembangan kerangka kerja akuntansi berbasis akrual, dan sosialisasi, sampai dengan tahun 2015 yaitu pengimplementasian penuh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat setiap tahunnya selalu dilakukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan kualitas pengguna Standar Akuntansi Pemerintahan dan strategi yang dilakukan yaitu pengembangan sistem teknologi informasi. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sudah menggunakan sistem komputerisasi yang mana diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam membuat laporan keuangan dan sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi keuangan kepada masyarakat. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih telah menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem ini merupakan salah

satu bagian dari pengembangan sistem akuntansi dalam penerapan standar akuntansi pemerintah. Dengan adanya sistem terkomputerisasi diharapkan penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat terlaksana secara efektif.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam membuat laporan keuangan yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Misnawati (2015) mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah Istimewa Aceh, Kota Lhokseumawe. Penelitian yang dilakukan oleh Misnawati (2015) meneliti mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada DPPKAD Kota Lhokseumawe yang hasilnya menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Lhokseumawe. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Misnawati (2015), peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih. Diharapkan dari hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Prabumulih.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan, yaitu “Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Prabumulih?”

c. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi kegunaan, dan kendala dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih.

d. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain

a. Manfaat Teoretis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menyumbang salah satu kasus tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan bagi Ilmu Administrasi Negara khususnya pada konsentrasi Keuangan Negara.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat atau menjadi masukan bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Prabumulih dalam membuat laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga
- Creswell, Jhon.W . 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Erlina, Omar, Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah : Berbasis Akrua*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2011. *Sistem Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Nordiawan.2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Singarimbun dan Effendi. 2011. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta : Bandung.

Peraturan Perundang-undangan:

- Pemerintah Republik Indonesia, 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Walikota Prabumulih,2014. *Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Kota Prabumulih*. Prabumulih: Sekretaris Daerah Kota Prabumulih.

Karya Ilmiah:

- Nugraheni, Purwanti, 2008. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Jurnal: Ekonomi Bisnis Universitas Gunadarma.
- Maqassary, Ardi Al. 2008. *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara*. Jurnal: Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra.

Oktarina, Mia. 2014. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang*. Jurnal: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pandanarang Semarang.

Supriyanto, 2015. *Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah*. Jurnal : Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret.

Lumintang, Natalia Deisi, 2015. *Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan*. Jurnal: Politeknik Negeri Manado.

Internet:

Misnawati.2015. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. [http:// /pengaruh-penerapan-standar akuntansi.html](http://pengaruh-penerapan-standar-akuntansi.html) diakses pada tanggal 2 November 2016 pukul 20.25 WIB

Lamunisi, Sony. 2016. *Analisis Implementasi Basis Akrual Pada Laporan Keuangan*. [http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/ 11592/11188](http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/11592/11188) diakses pada tanggal 23 Desember 2016 pukul 21.10 WIB